

**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori
Pemidanaan**

(Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)

Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, Dosen Pembimbing I Ibu Eny Harjati, SH,
M.Hum., Dosen Pembimbing II Ibu Yuliati, SH, LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : rara_kristi@yahoo.com

ABSTRAKSI

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat diketahui berdasarkan hal-hal yang meliputi: status sosial, perekonomian keluarga, dan riwayat hidup anak, motif melakukan tindak pidana, pengakuan serta penyesalan oleh terdakwa, serta sikap terdakwa apabila menaati peraturan selama persidangan berlangsung tentu saja memiliki nilai tersendiri bagi Hakim. Jumlah sanksi pidana penjara bagi terdakwa anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya meskipun terdakwa melanggar ketentuan Pasal dalam KUHP yang sama karena Hakim Anak memiliki dasar pertimbangan tersendiri dengan memperhatikan kebutuhan terdakwa anak selama dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, keadilan bagi korban yang mengalami kerugian, mengembalikan ketertiban masyarakat, serta memperhatikan kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dengan teori tujuan pemidanaan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

ABSTRACT

Basic considerations of Judge in imposing imprisonment sanctions against perpetrators of the crime of theft by child known by the things inherent in the perpetrator of defendant, include: social identity, financial of family, and the history of child, motivation of doing the crime, recognition and expressed regret by the defendant, and the attitude of defendant if obey the rules during the assembly working will get the Judge's point. How long of the jar sanction for defendant in the juridication of District Court fo Mojokerto City is not always be the same for anther defendant eventhough they disobey the same rules of KHUP because the Judges have the basic considerations that need during get the rehabilitation in the jar of child, the justice for the victims, and take back the confortble live in society, and focus by the suitable between the basic consideration of Judges and the theory of criminal law.

Key word: *Crime of Theft by Child*

Pendahuluan

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas.¹ Apabila seorang anak tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung perkembangannya serta tanpa memiliki batasan dalam pergaulannya, maka anak tersebut cenderung menjadi anak yang berpotensi melakukan perbuatan menyimpang serta perbuatan yang melawan hukum, dan akan menimbulkan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, namun harus tetap berkeadilan.

Perlindungan hukum bagi anak sangat dijamin oleh negara, sehingga meskipun anak pelaku tindak pidana pencurian dijatuhi pidana penjara, anak tersebut ditempatkan di penjara khusus anak supaya psikis anak tidak terganggu dan tidak terpengaruh oleh narapidana dewasa. Apabila anak pelaku tindak pidana ditempatkan di penjara dewasa, maka anak tersebut tidak akan jera akan perbuatannya melainkan psikis dan kepribadiannya dapat terpengaruh oleh orang dewasa dan anak tersebut dapat memiliki kepribadian dan tingkah laku lebih buruk lagi setelah kembali bersosialisasi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Hakim anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada paragraf 3 Bagian Umum menyatakan bahwa dalam menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Karena itu pula Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengatur secara spesifik terkait dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan kenakalan.²

Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa tidak selalu sama meskipun melanggar ketentuan yang sama dalam KUHP, sebab dalam

¹ Djamil Nasir, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

² Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 79.

menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi terdakwa anak, Hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan terdakwa, keadilan bagi korban, ketertiban masyarakat, serta disesuaikan dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Dengan demikian diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Anak terhadap terdakwa adalah keputusan yang bijaksana dan berkeadilan bagi semua pihak.

Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto?
2. Bagaimana kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan teori tujuan pemidanaan?

Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis-empiris*, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan menganalisis mengenai bagaimana dasar pertimbangan dan kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis Sosiologis*, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematisa hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.³ penelitian ini mendasarkan pada peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan beserta aspek sosialnya. Metode pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data akurat yang dikehendaki mengenai suatu masalah yang diteliti dengan melakukan tinjauan secara

³ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 42.

langsung ke lapangan dimana letak masalah terjadi, serta memperhatikan fakta-fakta tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya kemudian dibuat suatu perbandingan. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Pengadilan Negeri Mojokerto, karena di Pengadilan Negeri Mojokerto terdapat kasus pencurian oleh anak dan telah diuraikan dalam latar belakang bahwa seluruh anak pelaku tindak pidana pencurian dijatuhi sanksi pidana penjara supaya sanksi yang tegas tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pada tahun 2011 terjadi 15 (lima belas) kasus pencurian oleh anak, pada tahun 2012 terjadi 6 (enam) kasus pencurian oleh anak, dan pada tahun 2013 terjadi 11 (sebelas) kasus pencurian oleh anak.⁴ Dari data jumlah perkara tindak pidana pencurian oleh anak tersebut merupakan putusan inkrah

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu di Pengadilan Negeri Mojokerto. Teknik pengumpulan data primer sebagai data utama dari penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan melakukan wawancara secara bebas terpimpin terhadap responden yaitu Hakim anak dan Hakim yang pernah menangani perkara anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman namun masih memungkinkan melakukan berbagai variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara berlangsung. Secara spesifik bentuk data tersebut antara lain: Undang-undang yang berkaitan dengan perihal dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, peraturan yang berlaku di Indonesia, serta literatur yang berkaitan. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi tentang putusan perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Mojokerto, antara lain: pada tahun 2011 terjadi 15 (lima belas) kasus tindak

⁴ Survey awal pada tanggal 30 Desember 2013 di Pengadilan Negeri Mojokerto.

pidana pencurian oleh anak, pada tahun 2012 terjadi 6 (enam) kasus tindak pidana pencurian oleh anak, dan pada tahun 2013 terjadi 11 (sebelas) kasus tindak pidana pencurian oleh anak, dimana mayoritas pelaku berjenis kelamin laki-laki.⁵ Data tersebut merupakan data yang telah inkraht.

Jenis data dalam penelitian ini adalah Jenis Data Primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu di Pengadilan Negeri Mojokerto. Data tersebut diperoleh secara langsung dari sumbernya yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden (Hakim) yang pernah mengadili perkara pencurian oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden berupa spesifikasi Pengadilan Negeri Mojokerto, realita perkara pencurian oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, serta kesesuaian pertimbangan Hakim dengan teori tujuan pemidanaan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui hasil studi dokumentasi dan kepustakaan yang diperoleh dari dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Mojokerto. Selain itu secara spesifik wujud dari data sekunder adalah Undang-undang yang berkaitan dengan perihal dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, peraturan-peraturan yang berlaku, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah obyek yang menjadi penelitian, yaitu seluruh Hakim yang pernah menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Mojokerto. Sampel dalam penelitian inia dalah *purposive sampling* yaitu bahwa menunjukkan sampel berdasarkan ciri-ciri maupun sifat-sifat tertentu yang dipandang berkaitan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, yaitu seluruh hakim yang pernah menangani

⁵ Hasil survey pada tanggal 9 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Mojokerto.

pekara pencurian oleh anakdi wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif (Deskriptif Analisis) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.⁶

A. Realita Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak yang Ditangani Pengadilan Negeri Mojokerto

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen Pengadilan Negeri Mojokerto terdapat banyak perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak yang Sudah Diputus Pengadilan Negeri Mojokerto dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.

Data Perkara Pencurian di Pengadilan Negeri Mojokerto

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	2011	15	14	1
2.	2012	6	6	-
3.	2013	11	10	1

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah perkara tindak pidana pencurian oleh anak pada tahun 2011 sebanyak 15 (lima belas) perkara dimana 14 (empat belas) orang anak berjenis kelamin laki-laki sedangkan 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan, pada tahun 2012 terdapat 6 (enam) perkara dimana seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 11 (sebelas) perkara dimana terdapat 10 (sepuluh) orang anak berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan. Jumlah perkar pencurian oleh anak dari tahun 2011sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Dapat diketahui pula bahwa mayoritas pelaku

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 91.

berjenis kelamin laki-laki. Relita tersebut senada dengan pernyataan Made Sadhi Astuti, bahwa: ⁷

Anak laki-laki mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana jika dibandingkan dengan anak perempuan, karena anak laki-laki mempunyai sifat lebih berani dan tidak mengenal bahaya, gemar membaca dengan teman-temannya melalui jalan-jalan di kota maupun di luar kota. Sedangkan anak perempuan lebih suka tinggal di rumah dan perasaannya lebih halus daripada anak laki-laki.

Selanjutnya penulis akan menyajikan data perkara tindak pidana pencurian oleh anak yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Mojokerto pada tabel berikut.

Tabel 5.

Contoh Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Pengadilan Negeri Mojokerto

No.	Nomor Perkara	Terdakwa Anak	Usia (Th)	Pidana (Bln)	Pekerjan
1.	014/ Pid. B / 2013 / PN. MKT.	Badrun	16	7	Tidak Bekerja
2.	231/ Pid. B / 2013 / PN. MKT.	Bagong	16	1	Pelajar
3.	019/ Pid. B / 2013 / PN. MKT.	Harun	16	6	Pelajar
4.	211/ Pid. B / 2013 / PN. MKT.	Joni	16	3	Tidak Bekerja

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 20014.*

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pelaku memiliki usia yang sama dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pencurian, namun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berbeda satu dengan yang lain. [Kecenderungan Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 362, 363, 364, 367 KUHP berdasarkan pada keyakinan Hakim dan juga didukung](#)

⁷ Made Sadhi Astuti, *op.cit.* hal. 152.

dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan.⁸ Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim Anak telah mempertimbangkan secara matang dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Sehingga pemidanaan tersebut bukan hanya menjatuhkan sanksi agar anak menjadi jera melainkan sanksi pidana penjara diharapkan mampu menjadi sarana pembinaan dan memberikan rehabilitasi bagi terdakwa anak.

Putusan Hakim terhadap perkara tindak pidana pencurian oleh anak tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, hal ini disebut sebagai putusan disparitas yaitu bahwa Hakim dapat memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Penyebab terjadinya perbedaan dalam hasil putusan dengan perkara yang sama dapat berasal dari berbagai faktor yang akan dibahas pada sub bab berikutnya. Hakim harus menjadikan hal-hal tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar tujuan dari pemidanaan tercapai.⁹

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum.. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta

⁸ Hasil wawancara dengan Vonny selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

⁹ Hasil wawancara dengan Purnama selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Dalam mempertimbangkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan pencurian perlu mendapat perhatian khusus, sebab putusan Hakim pada peradilan anak harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif serta pembinaan moral terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. Sebab meskipun terdakwa anak dijatuhi pidana penjara, tetap berhak memperoleh pendidikan serta pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.¹¹

Untuk semakin memperkuat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, maka Hakim juga memerlukan alat bukti yang dapat dihadirkan di dalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan supaya Hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut sebab apabila alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang disidangkan maka dapat menyebabkan ketidakyakinan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.¹² Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362, 363, 364, dan, 367 KUHP, Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Mojokerto, antara lain:

1. Dasar yang meringankan

a) Latar belakang pendidikan terdakwa

¹⁰ Hasi wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013.

¹¹ Hasil wawancara dengan Vonny, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (dioalah).

¹² Hasi wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013.

Apabila seorang anak sedang menempuh pendidikan sekolah, maka Hakim akan mempertimbangkan berapa lama terdakwa dipidana. Tentu saja jumlah pidananya lebih ringan karena terdakwa harus menyelesaikan pendidikannya.¹³

b) Latar belakang keluarga

Menurut Hakim Purnama, Seorang anak yang latar belakang keluarganya berpendidikan serta keluarga baik-baik tentu saja putusan pidana penjaranya lebih ringan dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga *broken home*.

c) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa apabila sopan selama persidangan berlangsung.¹⁴

d) Latar belakang perbuatan terdakwa

Ditinjau dari apakah terdakwa mencuri karena desakan ekonomi atau karena iseng.¹⁵

e) Terdakwa belum pernah dihukum

Tentu saja sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang pernah berhadapan dengan hukum.¹⁶

f) Riwayat hidup terdakwa baik

Apabila berdasarkan hasil penelitian dari sumber terpercaya sekitar tempat tinggal maupun pergaulan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memiliki kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam memperingan sanksi pidana bagi terdakwa.¹⁷

g) Terdakwa mengakui perbuatannya

¹³ Wawancara dengan Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

¹⁴ Hasil wawancara dengan Vonny, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

¹⁵ Wawancara dengan Tadjudin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

¹⁶ Hasil wawancara dengan Vonny, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

¹⁷ Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya.¹⁸

2. Dasar yang memberatkan

a) Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali

Apabila terdakwa residivis maka sanksi pidana penjara yang diberikan jauh lebih berat supaya terdakwa anak menjadi jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.¹⁹

b) Latar Belakang Pendidikan Terdakwa

Berdasarkan pernyataan Purnama, terhadap terdakwa yang tidak menempuh pendidikan, sanksi pidana penjara lebih lama karena terdakwa sedang tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikannya.²⁰

c) Latar Belakang Keluarga

Hakim memiliki pertimbangan bahwa baik anak dari latar belakang keluarga yang kurang memberikan perhatian lebih maupun anak *broken home* memiliki keterbatasan kasih sayang sehingga terbentuk karakter sebagai anak nakal dan rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan harapan sanksi yang diberikan mampu mengubah karakter anak menjadi lebih baik.²¹

d) Terdakwa sempat menikmati hasil curian

Apabila terdakwa sempat menikmati hasil curian barang milik korban yang dimiliki secara melawan hukum maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memperberat sanksi pidana.²²

e) Riwayat hidup terdakwa buruk

Apabila terdakwa memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun pergaulannya

¹⁸ Hasil wawancara dengan Vonny, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tadjudin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

²⁰ Wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

²¹ Hasil wawancara dengan Vonny, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

²² Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Desember 2013 (diolah).

yang memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak dalam bertingkah laku dan tidak ada harapan bahwa perilaku serta kepribadian anak dapat diperbaiki lagi, maka hal tersebut dapat memperberat sanksi bagi terdakwa.²³

f) Terdakwa tidak sopan dalam persidangan

Apabila sikap dan emosional terdakwa anak selama persidangan berlangsung terpuji, maka hal tersebut dapat eringankan sanksi terdakwa. Sebab dari sikap danemosiaona terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk.²⁴

g) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban

Apabila korban mengalami kerugian materiil akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak, hal tersebut berarti bahwa terdakwa telah menikmati hasil cuian.²⁵

h) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hakim memperberat sanksi pidana bagi terdakwa agar masyarakat menjadi tenang dan damai.²⁶

i) Orang tua tidak sanggup mendidik

Apabila berdasarkan pengakuan dari orang tua terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak sanggup mendidik terdakwa maka sanksi pidana penjara lebih berat dengan harapan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak di Mojokerto, terdakwa anak mendapatkan pembinaan yang terbaik.²⁷

C. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan

²³ Hasil wawancara dengan Tadjudin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

²⁴ Hasil wawancara dengan Tadjudin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

²⁵ Wawancara dengan I.A. Sri Adriyathi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (diolah).

²⁶ Hasil wawancara dengan Vonny, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

²⁷ Hasil wawancara dengan Tadjudin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014.

Seorang Hakim yang bijaksana apabila akan menetapkan amar putusan maka terlebih dahulu ia akan mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat serta dampak apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut, mengingat bahwa pelaku adalah anak yang belum dewasa. Apabila seorang Hakim tidak dapat bersikap bijaksana dalam manjatuhkan sanksi pidana serta tidak memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga terdakwa. Untuk menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan.²⁸ Mengingat mengenai teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana guna mencari alasan pembeda terhadap penjatuhan sanksi pidana, dapat ditentukan melalui 3 teori, yaitu: Teori Absolut yaitu bahwa tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana ditujukan pada penjahatnya adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan supaya pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Apabila anak pelaku tindak pidana pencurian hanya diberikan teguran atau nasihat maka berdasarkan teori ini hal tersebut tidak dapat membuat pelaku jera.²⁹ Teori Relatif adalah teori yang mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.³⁰ Seperti yang dialami oleh terdakwa Bagong sesuai dalam berkas pengadilan nomor 231/Pid.B/2013/PN.MKT, dalam perkara tersebut terdakwa melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP dan hanya dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut dikarenakan terdakwa belum sempat menikmati hasil curian. Oleh sebab itu Hakim menggunakan teori relatif dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, yaitu bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bersifat menakut-nakuti. Dengan

²⁸ Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2013 (Diolah).

²⁹ Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

³⁰ Hamzah Andi, *op. cit.*, hal. 34.

demikian terdakwa akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.³¹ Teori Gabungan adalah perpaduan antara teori absolut dan relatif. Jadi pertimbangan Hakim harus sesuai teori tujuan pemidanaan.³² Hakim yang bijaksana adalah Hakim yang menjatuhkan putusan dengan memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan serta kesesuaiannya dengan teori tujuan pemidanaan demi terciptanya keadilan.³³

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sanksi pidana penjara oleh Hakim terhadap terdakwa anak tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, ini disebut putusan disparitas dimana hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Penyebab terjadinya perbedaan dalam hasil putusan dengan perkara yang sama dapat berasal dari berbagai faktor, contohnya keadaan ekonomi dan sosial, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dengan teori tujuan pemidanaan. Hakim harus menjadikan hal-hal tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar tujuan dari pemidanaan tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan dalam pemberian efek jera serta pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

2. SARAN

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hendaknya Hakim bersikap semakin tegas supaya efek jera dapat dirasakan terdakwa dan bukan saja sanksi yang diutamakan melainkan pembinaan serta bimbingan moral bagi terdakwa juga lebih ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan putusan Hakim dalam menangani perkara anak senantiasa berkeadilan dan tindak pidana oleh anak dapat berkurang.

³¹ Hasil wawancara dengan Purnama, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

³² Hasil wawancara dengan Vonny Trisaningsih, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

³³ Hasil wawancara dengan Wahyudi Saib, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Januari 2014 (diolah).

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Andi Hamzah, 1986, **Sistem Pidana danPemidanaan Indonesia dari Retribusi Ke Reformasi**, Jakarta:Pradnya Paramita.

Bambang Sunggono, 2005, **Metode Penelitian Hukum, Jakarta:** Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Rineka Cipta.

Djamil Nsir, 2012, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta: Sinar Grafika.

Made Sadhi Astuti, 2003, **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**, Malang: Universitas Negeri Malang.

Nashriana, 2012, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Jakarta: PT.Raja Grafindo Indonesia.